

REALISASI INVESTASI ACEH 2021 SENILAI RP 10,8 T, LAMPAUI TARGET RPJMA DAN BKPM



FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, didampingi Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, memaparkan peluang investasi Aceh kepada Persatuan Emirat Arab (PEA) di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (13/9/2021).

SERAMBINWEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marthunis menyatakan realisasi investasi Aceh tahun anggaran 2021 mencapai senilai Rp 10,8 triliun itu, atau melampaui sebesar 163,9 persen, dari target investasi yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) hanya senilai Rp 6,6 triliun dan melampaui sebesar 201,8 persen target investasi yang diberikan BKPM untuk Aceh pada tahun lalu senilai Rp 5,4 triliun.

“Realisasi investasi Aceh pada tahun 2021 lalu yang melampaui target RPJMA dan BKPM itu, sebagai bukti kongkrit bahwa pemodal asing, nasional dan lokal, sudah percaya dengan iklim investasi di daerah ini sudah sangat kondusif,” kata Marthunis, dalam acara konferensi pers Realisasi Investasi Aceh Triwulan IV dan Tahun Anggaran 2021, di Aula Kantor DPMPTSP, Selasa (8/2/2022) di Banda Aceh.

Marthunis menjelaskan, realisasi investasi Aceh tahun 2021 senilai Rp 10,899 triliun itu bersumber dari 2.940 paket proyek investasi dari 1.218 PMA/PMDN, dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 15.279 orang. Realisasi investasi Aceh tahun lalu senilai Rp 10,899 triliun itu, dari sumber investasi PMDN nilainya mencapai Rp 7,927 triliun dan investasi PMA senilai Rp 2,971 triliun.

Kadis DPMTSP mengungkapkan, realisasi PMDN senilai Rp 7,927 triliun itu, paling besar investasinya disumbangkan dari sektor usaha listrik, gas dan air Rp 3,405 triliun atau 42,93 persen, namun serapan tenaga kerjanya rendah hanya 216 orang, tidak ada serapan tenaga kerja asing. Kedua, sektor usaha konstruksi senilai Rp 1,953 triliun

miliar, atau 24,63 persen, dengan jumlah serapan tenaga kerjanya cukup lumayan banyak 855 orang, tenaga kerja asing tidak ada.

Ketiga sektor usaha industri makanan, dengan nilai investasi Rp 888,1 miliar atau 11,20 persen, dengan jumlah serapan tenaga kerja 760 orang, tidak ada tenaga kerja asing, keempat sektor usaha industri kimia dan farmasi Rp 364,7 miliar dengan serapan tenaga kerja 201 orang, tidak ada tenaga kerja asing dan kelima sektor perdagangan dan reparasi senilai Rp 300 miliar, atau 3,78 persen, dengan serapan tenaga kerja sangat banyak mencapai 2.782 orang dan tidak ada tenaga kerja asing. Penyebaran investasi lima besar PMDN tadi, lanjut Marthunis, paling besar ada di Lhokseumawe dengan nilai Rp 2,512 triliun, selanjutnya Aceh Besar senilai Rp 1,605 triliun, kemudian Aceh Barata daya senilai Rp 607,6 miliar, kemudian Aceh Utra senilai Rp 577,8 miliar dan Aceh Tengah senilai Rp 547,7 miliar.

Untuk investasi PMA, kata Marthunis, investasi paling besarnya juga masih tetap pada bidang usaha listrik, gas dan air dengan realisasi 161,121 juta dollar AS, dengan jumlah tenaga kerja Indonesia 98 orang dan tenaga kerja asing 8 orang, kemudian bidang usaha tanaman pangan senilai Rp 21,315 juta dollar AS, dengan serapan tenaga kerja Indonesia 775 orang dan TKA kosong, kemudian bidang usaha Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi senilai Rp 13,353 juta dollar AS. Selanjutnya bidang usaha industri makanan senilai 3,308 juta dollar AS dengan serapan TK 8 orang dan TKA kosong, dan bidang usaha pertambangan 1,309 juta dollar AS.

Ada lima negara yang masih mendominasi investasi PMA di Aceh, sebut Marthunis, pertama masih tetap Cina senilai 145,262 juta dollar AS, kedua Malaysia senilai 45,735 juta dollar AS, ketiga Belgia senilai 4,454 juta Dollar AS, keempat Singapura 2,060 juta dollar AS dan kelima Korea Selatan 1,845 juta dollar AS. Marthunis mengatakan, untuk tahun 2022 ini, dirinya masih tetap optimis target investasi daerah ini bisa melampaui dari targetnya seperti tahun lalu. Optimisme itu, didasari, sejalan dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi nasional dan daerah, bisa terkendalinya kasus covid 19 di tahun ini, sama seperti pengendalian pertengahan tahun lalu.

Realisasi investasi PMDN, kata Marthunis, masih terus berjalan, terutama dalam bidang konstruksi jalan tol, listrik, gas, air, industri makanan, perkebunan dan perdagangan serta transportasi. Misalnya dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, kata Marthunis, PT PIM, terus melanjutkan investasi pembangunan pabrik pupuk NPK dan lainnya. Selanjutnya PGA, juga akan menanamkan investasinya dalam bidang industri gas.

Kemudian di KIA Ladang Aceh Besar, beberapa perusahaan eksportir cangkang sawit dari luar Aceh, akan menjadikan sebagian lahan KIA Ladang itu, sebagai penumpukan cangkang kelapa sawitnya yang mau diekspor ke Jepang dan Negara lain.

"Termasuk pembangunan pabrik minyak goreng curah kelapa sawit, terus kita dorong agar bisa hadir di Aceh," ujar Marthunis.

Lokasi untuk pembangunan pabrik minyak goreng curah kelapa sawit, kata Marthunis, sudah dipersiapkan di Nagan Raya dan di wilayah itu juga banyak pabrik kelapa sawit (PKS), produsen CPO, bahan baku minyak goreng. Diharapkan, pada tahun ini, sejalan bisa dikendalikannya kasus covid 19, ada orang yang ingin bangun pabrik minyak goreng dengan target pasar tidak hanya wilayah Aceh, tapi India, Banglades, Srilangka dan Negara-Negara Asia Selatan lainnya.

"Program kita ke depan, kata Marthunis, mengajak investor PMA dan PMDN, untuk menanamkan investasinya ke hilirisasi industri pengolahan bahan baku menjadi bhan jadi, seperti CPO kepada berbagai bahan industri makanan, termasuk minyak goreng, mentega dan lainnya," ujarnya. DPMPTSP Aceh, kata Marthunis, terus melakukan promosi ke berbagai negara dan daerah, untuk mengajak investor menanamkan investasinya dalam bidang usaha perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan dan industri pengolahan serta pengalengan ikan. "Aceh punya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Lampulo, yang diberi nama PPS Kutaradja, memiliki potensi sangat besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan ekspor perikanan untuk Indonesia bagian barat, dengan jalur ekspor ke berbagai negara Asia Selatan, Singapura, Brunai Darussalam, Jepang, Arab dan lainnya," ujar Marthunis.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/realisasi-investasi-aceh-2021-senilai-rp-108-t-lampau-target-rpjma-dan-bkpm?page=all.>, Selasa, 8 Februari 2022.

Catatan:

1. Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 154
 - (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
 - (2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh.
 - (3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-

luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.

b. Pasal 155

- (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
- (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

c. Pasal 165

- (1) Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.